

PPPK Daerah Mamuju Berpotensi Beralih Jadi Pegawai Pusat, BKPP: Masih Tunggu Petunjuk Teknis

Selasa, 25 Agustus 2026

Penulis: [Baiq Sukma Widiawati](#) | Editor: [Nurhadi Hasbi](#)



PENGANGKATAN PPPK - Herman (Cheng), Kepala BKPP Mamuju, saat diwawancarai terkait peralihan status PPPK daerah menjadi pegawai pusat, Senin (25/8/2026).

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Wacana pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah menjadi pegawai pemerintah pusat hingga kini belum memiliki kepastian teknis di Kabupaten Mamuju.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP) Kabupaten Mamuju, Herman yang akrab disapa Cheng, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait wacana tersebut.

Menurut Herman, informasi mengenai kemungkinan pengalihan PPPK daerah menjadi pegawai pusat sebelumnya memang telah disampaikan pemerintah pusat.

Namun, informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar pelaksanaan di daerah karena belum disertai aturan teknis secara tertulis.

Herman mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme pengalihan tersebut, termasuk siapa saja yang dapat dialihkan dan bagaimana proses pengusulannya.

Ia menegaskan, BKPP Mamuju tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum atau petunjuk teknis yang jelas.

"Ini bukan pegangan kami karena belum ada secara tertulis untuk merujuk itu," jelasnya kepada Tribun-Sulbar.com saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jalan Soekarno Hatta, Senin (25/8/2026).

Perpanjangan Kontrak [PPPK Mamuju](#)

Di tengah menunggu kepastian pengalihan PPPK, Pemerintah Kabupaten Mamuju saat ini juga melakukan proses perpanjangan kontrak PPPK yang masa perpanjangannya berakhir pada 2026.

Herman menyebut, terdapat sekitar 1.400 lebih PPPK yang masa perpanjangannya berakhir pada Maret, Mei, dan Juli 2026.

Kontrak mereka diperpanjang hingga Desember 2026 karena mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

PPPK tersebut terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.

BKPP Mamuju juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing PPPK di daerah.

Hal itu dilakukan karena pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan anggaran untuk membiayai PPPK pada tahun ini.

Namun, Herman menegaskan belum ada kepastian apakah relaksasi tersebut akan berlanjut pada tahun berikutnya.

Karena itu, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat mengenai pembiayaan PPPK ke depan, termasuk apabila nantinya benar terjadi pengalihan PPPK daerah menjadi pegawai pusat. (*)

Laporan wartawan [Tribun-Sulbar.com](#), Baiq Sukma Widiawati

Sumber: [Tribun sulbar](#)